

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI PUSKESMAS KEDUNGORO KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA

Anisa Kurniatul Azizah¹, Fatimatul Mukhibbah Azkiya², Anidya Pryhasstya Puteri³
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Bhayangkara Surabaya¹²³

anisa@ubhara.ac.id¹, kikyfatimatul24@gmail.com , Anidvaputeri27@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the process of implementing the KB Village program. In this study, the focus will be on what factors determine the process of implementing the KB village program. Broadly speaking, the KB Village program is an attempt by the central government through the BKKBN to move people to live a more prosperous and quality life. This study aims to describe the implementation of the KB Village program in Tegalsari District. This research method is descriptive using a qualitative approach. The population in this study was taken from 3 locations in the KB Village in Tegalsari District, Surabaya City. For the purposes of this research related to the establishment of Family Planning Counseling in Tegalsari District, the research was focused on KB Village, Tegalsari Sub-District (Malang Village), Dr. Sutomo (Pandegiling), Wonorejo Village. The results showed that the implementation of the KB Village program in Tegalsari District had gone well in terms of planning, coordination with the Kedungdoro Health Center in Surabaya, availability of infrastructure, contraceptives, and supervision. In addition, obstacles that need to be addressed are funding and PLKB personnel in the field. Therefore the implementation of the KB village program in Tegalsari District needs to be improved in the future.

Keywords: *Implementation, family planning, health center*

PENDAHULUAN

Negara adalah organisasi tertinggi di wilayah tertentu yang memiliki sekelompok masyarakat di dalamnya yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan secara bersama mengatasnamakan masyarakat dan mempunyai cita-cita untuk bersatu. Dan di suatu negara juga harus memiliki pemerintahan yang berdaulat memiliki peraturan yang berdasarkan sistem hukum yang diakui oleh negara lainnya. Adapun disini masalah yang dihadapi di berbagai negara adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dengan menggunakan berbagai kebijakan, seperti peningkatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pembangunan jembatan, pasar dan sarana lainnya, dan tidak

kalah pentingnya adalah di dalam sektor pembangunan SDM melalui peningkatan sektor pendidikan dan peningkatan di sektor kesehatan. Namun demikian faktor utama yang dihadapi semua negara baik negara maju dan berembang kendalanya hampir sama, yang pada umumnya bersumber dari permasalahan pada jumlah kependudukan. Dimana tiap hari jumlah angka jumlah kelahiran terus meningkat tiap harinya dan juga masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang reproduksi sehingga angka kematian bayi dan ibu melahirkan terus meningkat.

Permasalahan negara-negara di dunia pada abad 21 adalah permasalahan yang terkait dengan ledakan penduduk dunia. Tidak hanya pada sektor tersebut tetapi juga

dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia berupa air dan udara yang akan berdampak terhadap perubahan iklim global. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Pertumbuhan penduduk pada saat ini semakin meningkat menjadi masalah besar di Indonesia dibandingkan negara lain. Pertumbuhan penduduk di Indonesia mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mulai sektor ekonomi, sosial dan politik. Lebih khusus permasalahan terkait kependudukan terutama muncul pada aspek peningkatan mutu kehidupan atau disebut kualitas penduduk dalam sumber daya manusia yang dibarengi besarnya jumlah penduduk yang tidak terkontrol. Berdasarkan data proyeksi penduduk dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2013) dan BPS (2010) jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki laki dan 131,88 juta jiwa perempuan.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan di atas adalah melalui program Keluarga Berencana (KB). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu mengintervensi dalam mengatur kelahiran, tetapi tidak mengurangi hak seseorang sesuai dengan tujuan Program KB secara umum membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (UU No. 52 Tahun 2009).

Program kampung KB merupakan salah satu realisasi dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sesuai dengan indikator pencapaian program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Ketercapaian program ini dapat dinilai dari beberapa aspek yaitu aspek pengendalian kuantitas penduduk dan aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur

dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya. Aspek kedua ini dapat dinilai dari beberapa indikator yakni peningkatan pengguna KB baru, peningkatan jumlah ibu hamil dan menyusui yang mendapatkan pelayanan kesehatan, peningkatan jumlah remaja yang aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-R), penurunan jumlah perempuan yang buta aksara, peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera dan KS-1 dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) (Zuhriyah, Indarjo, dan Raharjo 2017).

Implementasi program KB lebih digalakkan pada era Presiden Soeharto, yang dilakukan dalam program tersebut adalah membatasi jumlah tunjangan anak yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977. Pegawai negeri hanya diberi tunjangan untuk maksimal tiga anak saja, sehingga program ini relatif berhasil. Setelah terjadinya reformasi dan pergantian pemerintahan, program KB ini justru terlihat tidak mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah. Implementasi program KB pasca reformasi hingga sekarang belum mampu secara optimal mengendalikan jumlah angka kelahiran, demikian juga yang terjadi pada kota Surabaya. Dalam lima tahun terakhir, berdasarkan hasil registrasi penduduk rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk Kota Surabaya meningkat. Meningkatnya pertumbuhan tersebut sebagai akibat dari tingkat kelahiran.

Sehubungan dengan terus menerus meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kota Surabaya, maka dibentuklah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas dan KB) sebagai penanggung jawab utama masalah KB di Kota Surabaya.

Bapemas dan KB membentuk beberapa bidang khusus untuk melaksanakan tugas-tugas. Mengenai KB, dibentuklah Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bapemas dan KB di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Surabaya terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya Selatan, Surabaya Timur, dan Surabaya Barat. Dari ke-5 wilayah tersebut wilayah Surabaya Pusat khususnya Kecamatan Tegalsari yang terpilih sebagai lokasi penelitian, karena Kecamatan Tegalsari memiliki jumlah akseptor baru KB terkecil dibandingkan kecamatan lain di wilayah Surabaya Pusat. Kecamatan Tegalsari memiliki 5 kelurahan yaitu Kelurahan Kedungdoro, Kelurahan Keputran, Kelurahan Tegalsari, Kelurahan Dr. Sutomo, dan Kelurahan Wonorejo. Sebagai tempat penelitian penulis yang lebih fokus yaitu Kelurahan Tegalsari (Kampung Malang), Kelurahan DR.Sutomo (Pandegiling), Kelurahan Wonorejo, karena Kelurahan tersebut memiliki penduduk terbanyak dibandingkan kelurahan lain di Kecamatan Tegalsari dan banyak penduduknya fanatik beragama Islam sehingga enggan untuk ber-KB. Selain terlalu fanatik dengan agamanya, rata-rata penduduknya pun berpendidikan rendah sehingga memiliki kesadaran yang rendah akan pentingnya KB. Atas dasar itu kami tertarik untuk mengambil judul jurnal penelitian "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Di Puskesmas Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya". Pengetahuan masyarakat yang baik tentang implementasi Kebijakan kampung KB dapat mendukung keberhasilan dalam mencapai target dari pelaksanaan program tersebut, sebab itu Pemerintah Kota Surabaya menjadikan Kebijakan kampung KB sebagai salah satu strategi pengentasan permasalahan kependudukan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kebijakan program KB, masalah-masalah yang kami temukan pada saat observasi langsung di

Puskesmas Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Kebijakan kampung KB di Puskesmas Kedungdoro Pada Masyarakat Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan kampung KB di Puskesmas Kedungdoro pada Masyarakat Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti disini adalah penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, maupun fenomena tertentu (Bungin, 2007:68).

Alasan memilih penelitian kualitatif deskriptif karena hasil penelitian yang dibutuhkan yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan pelaksanaan program KB di Puskesmas Kedungdoro pada masyarakat yang ada di Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, sehingga cocok untuk dijadikan penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, dengan data yang dikumpulkan berupa kalimat, bagan, gambar yang berfungsi untuk menjelaskan permasalahan. Deskripsi data-data yang diperoleh tersebut sebagai hasil penelitian yang diperoleh dari data-data tertulis

maupun lisan yang bersumber melalui orang-orang yang telah diwawancarai.

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan tiga cara. Ketiga teknik tersebut yakni observasi, wawancara serta dokumentasi. Sasaran atau informan yang dianalisis oleh peneliti yaitu Bidan, PLKB, Masyarakat. Analisis data tersebut menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan dalam program Keluarga Berencana yang ada di Puskesmas Kedungdoro pada masyarakat Kecamatan Tegalsari kota Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan kampung KB di Puskesmas Kedungdoro Pada Masyarakat Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya

Dasar hukum kebijakan KB mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 78 yang menyatakan program pelayanan KB mengatur kehamilan pasangan usia subur guna membangun generasi penerus yang sehat dan cerdas. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan bahwa Kebijakan KB dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab. Pemerintah bertanggung jawab menjamin penyediaan pelayanan KB yang aman dan bermutu sesuai standar profesi dan etik, yang berkelanjutan, dan dapat menjangkau dan terjangkau masyarakat.

Program KB tidak melarang tetapi mengatur supaya kehamilan terjadi hanya apabila ibu telah siap fisik, mental dan sosial. Apabila ibu belum siap hamil, ingin membatasi atau menunda kehamilan, program KB menganjurkan ibu memakai alat kontrasepsi sesuai kebutuhan kesehatan ibu. Sebagai prinsip, kehamilan sebaiknya terjadi

pada situasi risiko rendah untuk mengalami gangguan kesehatan.

Dalam mencapai tujuan antara, program KB mempunyai dua jalur strategi saling terkait: (a) meningkatkan permintaan ber-KB dari masyarakat pasangan usia subur, dan (b) memenuhi permintaan ber-KB melalui pelayanan kontrasepsi. Strategi meningkatkan permintaan ber-KB dari masyarakat pasangan usia subur dilakukan melalui kegiatan terencana dan terkoordinasi dalam advokasi, komunikasi, edukasi dan informasi dengan penanggung-jawab utama di jajaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sedangkan strategi memenuhi permintaan ber-KB dilakukan melalui penyediaan pelayanan kontrasepsi dengan penanggung-jawab utama di jajaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Kelembagaan program KB dipimpin BKKBN dan Kemenkes bekerjasama dan berkoordinasi dengan banyak pihak: pemerintah daerah, sektor/mitra terkait, dan swasta, termasuk masyarakat. Manajemen penyelenggaraan program dan layanan KB perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Program KB di Puskesmas Kedungdoro Kecamatan tegalsari pada umumnya sama dengan program KB di manapun. Perbedaan hanya terdapat pada cara pengimplementasian atau pelaksanaannya pada masing-masing daerah saja. Cara pengimplementasian program tersebut bergantung pada para pelaksana program dan partisipasi masyarakat daerah setempat.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi program KB di Kecamatan Tegalsari Surabaya sudah cukup baik dan berjenjang. Adanya pengawasan dari Kota saat melakukan pelaksanaan program KB di lapangan. Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan yaitu

melalui tenaga kerja kesehatan di Puskesmas Kedungdoro Kota Surabaya. Dan Pengawasan dari BKBPP (Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan) setiap ada pelaksanaan ada petugas dari BKBPP yang terjun langsung ke tempat pelaksana. Sistem pencatatan pelaporan pun sudah dilakukan berjenjang menurut tingkatannya. Sistem pencatatan dan pelaporan di Dinas Kesehatan berasal dari bidan dan Puskesmas tiap bulannya. Sedangkan sistem pencatatan pelaporan di tingkat BKBPP melalui UPTD Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang bekerjasama dengan bidan di Kecamatan Tegalsari dan tenaga kerja di Puskesmas Kedungdoro. Sistem pencatatan pelaporan pengendalian di lapangan adalah kegiatan mencatat dan melaporkan berbagai aspek yang berkaitan dengan program pengendalian lapangan KB yang meliputi kegiatan kader, institusi masyarakat setempat, PLKB/PKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), pembinaan PUS (Pasangan Usia Subur) dan peserta KB, pembinaan ketahanan keluarga, dan pembinaan kesejahteraan keluarga.

Adapun teori yang menjadi rujukan dalam mendeskripsikan dan menganalisis adalah, menggunakan metode penelitian model implementasi milik George C. Edward III yang mengukur implementasi kebijakan menggunakan 4 faktor yakni Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, berikut merupakan uraiannya:

1. Komunikasi

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah program kebijakan yang pertama menurut Edward III (dalam Subarsono 2011:90-92) adalah komunikasi. Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan kebijakan Implementasi Program Keluarga Berencana ini dapat tersampaikan dan berjalan dengan baik. Dimana dalam penyampaiannya pun harus benar dan tepat agar masyarakat dapat memahami isi dari kebijakan Program Keluarga Berencana

tersebut. Merujuk pada hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan menunjukkan adanya komunikasi yang terjadi pada bidan, kader PKK dan masyarakat di kelurahan kampung malang, pandegiling dan wonorejo. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Selain itu, kebijakan yang disampaikan pun harus disampaikan dengan baik, jelas dan konsisten. Kebijakan harus disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga informasi yang tersampaikan menjadi jelas dan tepat sasaran, namun jika penyampaian tujuan dan sasarannya tidak tepat, maka besar kemungkinan akan terjadi sebuah penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu dibutuhkan tiga hal penting dalam komunikasi yang pertama yakni:

a. (Transmisi)/Penyampaian yang baik,

Dimana menurut Edward III (dalam Subarsono 2011:90-92) jika transmisi itu baik maka akan menghasilkan implementasi yang baik pula. Berkaitan dengan transmisi dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Berencana KB di Kelurahan kampung malang, pandegiling, dan wonorejo yang dilakukan oleh PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) yang berisi tentang bagaimana PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) memberi contoh, mempengaruhi, serta menggerakkan keterlibatan seluruh warga masyarakat di lingkungannya terutama di lingkungan Kelurahan di kelurahan kampung malang, pandegiling dan wonorejo guna mendukung keberhasilan program Keluarga Berencana. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) di lapangan, dapat diketahui bahwa dari transmisi atau penyampaian

informasi mengenai Program Keluarga Berencana prosesnya sendiri yaitu melalui metode penyuluhan atau konseling pada saat diadakannya posyandu, atau biasanya dilakukan jika sedang dilakukan pertemuan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan juga dilakukan saat adanya kegiatan posyandu dan perkumpulan ibu-ibu dengan melakukan Forum Group Diskusi dalam pelaksanaan program KB yang telah dijalankan selama ini, dan terkait penggunaan alat kontrasepsi. Disamping FGD adapun penyuluhan melakukan komunikasi tentunya pesan yang disampaikan kepada masyarakat oleh bidan harus memiliki muatan pesan yang baik dan tentunya bersifat persuasif. Persuasif sendiri bersifat seperti mengajak, inilah yang harus lebih ditekankan para petugas yang sudah ditunjuk untuk mengontrol jalannya program KB terhadap masyarakat, penekanan disini dimaksudkan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku dari masyarakat tetapi persuasif yang dilakukan harus secara halus, luwes dan yang mengandung sifat sifat manusiawi sehingga mengakibatkan kesadaran dan kerelaan yang disertai perasaan senang sehingga masyarakat di Kelurahan Kampung malang, pandegiling, wonorejo bisa merata keikutsertaanya dalam Program Keluarga Berencana.

b. Kejelasan komunikasi

Dimana kejelasan dalam memberikan informasi merupakan hal yang sangat penting karena dengan adanya kejelasan informasi dan komunikasi diharapkan tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan masyarakat. Agar penyampaian informasi dapat diterima dengan jelas oleh masyarakat terutama masyarakat Kelurahan Kampung malang, pandegiling dan wonorejo maka dalam tata cara teknis sendiri bidan menggunakan beberapa cara yakni, menggunakan alat peraga seperti lembar balik atau KIE KIT

yang cukup membantu peragaan dalam penyuluhan di masyarakat tentang alat kontrasepsi dan dimana bidan memberikan informasi atau penyuluhan tentang pentingnya penggunaan alat kontrasepsi, lalu adapun materi yang diberikan pada saat posyandu yaitu terkait informasi atau penyuluhan tentang KB kepada masyarakat yang memiliki bayi, balita dan juga ibu hamil, dimana penyuluhan tentang KB di informasikan kepada ibu hamil agar ketika ibu hamil sudah melahirkan disarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi, agar setiap anak memiliki jarak lahir yang tepat, serta memberitahu bagaimana pentingnya menggunakan alat kontrasepsi dan memberitahu bagaimana penggunaan alat kontrasepsi yang baik, dan memberitahu apa saja jenis-jenis alat kontrasepsi untuk wanita dan untuk pria. Adapun beberapa hal yang dilakukan bidan dalam kegiatan penyuluhan di lapangan, diantaranya seperti pengenalan alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur, kontrol alat kontrasepsi bagi peserta KB-tetap dan beberapa kegiatan lain seperti konseling. (Subarsono 2011:90-92)

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan sebuah program karena suatu kebijakan sangat memerlukan dukungan sumber daya. Sumber daya tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia, Sumber daya manusia dalam suatu pelaksanaan program kebijakan merupakan hal yang sangat penting dan paling mempengaruhi karena tanpa adanya ketersediaan staf yang berkualitas maka sebuah program

akan berjalan dengan lambat. Sumber daya (staff) yang dimaksud dalam pelaksana kebijakan Implementasi Program Keluarga Berencana disini adalah PLKB, (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), yang memiliki peran paling penting dan yang menjadi eksekutor dalam setiap kegiatan program keluarga berencana baik di tingkat desa maupun kelurahan, oleh karenanya PLKB harus memiliki kesiapan dalam melakukan kegiatannya di lapangan. Di Kelurahan Sumur Batu sendiri terdapat Empat orang anggota PLKB diantaranya, Kelangkaan jumlah PLKB tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yaitu seperti pensiun, mutasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke SKPD lain serta sosialisasi kebutuhan PLKB yang kurang. Dampak kekurangan PLKB membuat perkembangan Program KB di Kelurahan Kampung malang, pandegiling, dan wonorejo kurang berjalan dengan baik, pasalnya PLKB adalah ujung tombak kesuksesan KB, lantaran PLKB lah yang bersentuhan langsung dengan para peserta dilapangan, tidak idealnya jumlah PLKB menjadi salah satu penyebab rendahnya penerapan Program KB di kelurahan kampung malang, pandegiling dan wonorejo yang mana kemudian berdampak pada tingginya jumlah penduduk di kecamatan tegalsari dalam 2 tahun ini. (Subarsono 2011:90-92)

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi merupakan sikap atau karakteristik dari pelaksana kebijakan seperti sikap positif serta komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya agar implementasi kebijakan dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tepat. Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana yang disampaikan oleh PLKB di kelurahan kampung malang, pandegiling dan wonorejo, bahwa bersikap baik dan juga profesionalisme merupakan hal yang sangat penting dan berpengaruh pada setiap klien yang diberikan pelayanan. Selain itu PLKB juga sangat mendukung penuh terkait pelaksanaan program Keluarga Berencana ini salah

satunya melalui mekanisme pengajuan permintaan alat kontrasepsi dari PLKB ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Bidang Keluarga Berencana untuk dimintai persetujuannya dengan cara permintaan dari PLKB serta melampirkan daftar akseptor, yang kemudian pendistribusian alat kontrasepsi ke PLKB dengan melampirkan dokumen serah terima barang yang tembusannya diberikan ke Bidang Keluarga Berencana, lalu setelah alat kontrasepsi itu diterima oleh PLKB, PLKB langsung menyalurkannya ke puskesmas. Berdasarkan kutipan wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa sikap atau karakteristik dari PLKB dalam melaksanakan kebijakan Program Keluarga Berencana di Kelurahan Sumur Batu sudah cukup baik karena berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di masyarakat, dimana masyarakat belum pernah mengeluhkan terkait sikap PLKB yang tidak baik. (Subarsono 2011:90-92)

4. Struktur Birokrasi

Menjelaskan bahwa struktur birokrasi merupakan norma-norma, karakteristik serta pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang yang memiliki hubungan potensial maupun nyata dalam menjalankan suatu kebijakan. Aspek dalam struktur birokrasi sendiri melingkupi dua hal yakni mekanisme dalam struktur birokrasi itu sendiri atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan sebagai pedoman oleh setiap implementor dalam bertindak atau menjalankan tugasnya dilapangan agar dalam melaksanakan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan yang dituju. (Subarsono 2011:90-92)

Faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan kampung KB di Puskesmas Kedungdoro pada Masyarakat Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

Kesadaran diri dari masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan program KB dalam menyelamatkan kehidupan perempuan serta meningkatkan status kesehatan ibu terutama dalam mencegah kehamilan tak diinginkan, menjarangkan jarak kelahiran mengurangi risiko kematian bayi di kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

Adapun bentuk dukungan yang ditemukan dalam proses implementasi Kebijakan kampung KB adalah sebagai berikut: Partisipasi masyarakat Berdasarkan uraian temuan dilapangan bahwasannya pelaksanaan Kebijakan kampung KB mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat Kecamatan Tegalsari, hal tersebut dapat terlihat dari antusiasme warga masyarakat dalam mengikuti berbagai kegiatan yang telah dicanangkan oleh pihak petugas Puskesmas Kedungdoro. Bentuk dukungan partisipasi masyarakat ini cenderung mendorong implementator lebih mudah untuk mencapai target dan sasaran dari kebijakan kampung KB.

Dalam tataran pelaksanaan selama 8 bulan terdapat berbagai hambatan yang ditemukan oleh PLKB di lapangan. Bentuk-bentuk hambatan tersebut antara lain adalah pemahaman masyarakat khususnya masyarakat di berbagai kelurahan yang ada di kecamatan tegalsari tentang Kampung KB (Nama, konsep dan kriteria lokasi) masih kurang karena Tim PLKB di semua tingkatan wilayah belum mantap dikarenakan adanya faktor internal karena kurangnya tenaga ahli yang mendampingi diawal pelaksanaan Kebijakan kampung KB. Konsistensi dan pemahaman masyarakat yang kurang tentang kampung KB (Nama, konsep dan kriteria lokasi) hal ini terjadi karena masyarakat

cenderung memahami bahwa tujuan dari kebijakan kampung KB akan sama dengan program KB pada umumnya. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan kampung KB khususnya dalam hal penyuluhan menggunakan fasilitas seadanya baik dari lokasi di Balai kelurahan maupun balai RW

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara serta dokumen-dokumen yang didapatkan, peneliti mendapatkan kesimpulan terkait penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana di Puskesmas Kedungdoro pada Masyarakat Kecamatan Tegalsari kota Surabaya. Kampung KB ini disampaikan dengan baik dan dapat diterima di masyarakat , pembahasan mengenai permasalahan yang dikaitkan dengan model implementasi Edward, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari implementasi Program Kampung KB di 3 kelurahan di kecamatan tegalsari belum tercapai sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan dan bisa kita lihat dengan banyaknya kegiatan- kegiatan yang dilakukan selama adanya Kampung KB dan warga pun mengetahui tujuan dari pembentukan Kampung KB ini untuk peningkatan kualitas hidup mereka dan adapun hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kampung di kecamatan tegalsari yakni kurangnya Tim PLKB.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti sampaikan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran yang bertujuan dapat membawa kota surabaya menjadi lebih baik lagi dalam mengimplementasikan Program Kampung KB di puskesmas kedungdoro

kecamatan tegalsari kota surabaya. Saran-saran tersebut antara lain :

1. Perlu mengeluarkan dan menambah aturan terkait dengan yang lebih mampu menjelaskan Program Kampung KB, tidak hanya sebatas surat edaran saja, melainkan juga perlu adanya sanksi yang mengikat atas setiap pelanggaran ketika implementor tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi yang sudah diberikan. Sehingga tidak hanya sekedar teguran saja dan dapat dipatuhi serta dijalankan dengan baik, mudah untuk di pahami.
2. Pemerintah Kota Payakumbuh sebaiknya memberikan dukungan APBD terhadap implementasi program ini, yakni berupa memberikan dukungan anggaran yang memadai sesuai yang diharapkan oleh bidan dari puskesmas kedungdoro dan PLKB kecamatan tegalsari agar dapat terlaksana dengan maksimal.
3. Meningkatkan sosialisasi agar semua yang terlibat dan target dari sasaran program Kampung KB dapat mengetahui dan paham dengan kebijakan yang dikeluarkan
4. Bidan dari puskesmas kedungdoro dan PLKB kecamatan tegalsari meningkatkan komunikasi dan koordinasinya dengan instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan, agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan maksimal.
5. Seharusnya bidan dari puskesmas kedungdoro dan PLKB kecamatan tegalsari dapat memaksimalkan sumberdaya yang ada di Kecamatan dan Kelurahan untuk berhasilnya implementasi kebijakan. Terutama Balai Penyuluh di tingkat Kecamatan tegalsari yang meliputi 3 kelurahan yakni kampung malang, pandegiling dan wonorejo.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (Vol. 2). Kencana.

- Hadi, Y. A. (2018). Implementasi Kebijakan Kampung KB Dalam Mengatasi Permasalahan Kependudukan (Studi pada Desa Gogodeso, Kabupaten Blitar) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Hasriani, H., Yunus, R., & Hamsinah, H. (2021). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 137-149.
- Indriana, I., Sambiran, S., & Kumayas, N. (2018). Implementasi Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- NAZARA, A. P. M., & Idris, H. (2021). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KB PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PUSKESMAS SAKO* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Saputra, Y. W., Lukas, L., Titin, A., & Rindantya, R. S. (2019). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kota Samarinda. *Jurnal Georafflesia*, 4(2), 186-200.
- Siregar, Z. Y. (2019). *Implementasi Program Kampung KB dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Pondok Batu Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Sos, J. P. S. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Wibawa, K., & Baehaki, I. (2020). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Dalam Rangka Peningkatan Kesertaan KB Pria di Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(1), 134-148.